TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Yoan Yonathan Silalahi¹ & Andryawan²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: yoan.205190144@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara*

Email: andryawan@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia in this modern era is slowly starting to see an increase in its economic sector. One of the reasons is that many entrepreneurs are increasingly widening their business fields. Many business entities are the choice, and Limited Liability Company (PT) is one of the business entities chosen by entrepreneurs. This is because PT has advantages that tend to "facilitate" for business actors, which other business entities do not have. Some of the advantages of PT that are not owned by other business entities are limited liability of shareholders, clear division of management and supervision structures, a more professional image when in the form of PT, then getting credit facilities from banking and financial institutions in general to the requirements of the company's business form in certain industries, such as banking, insurance, capital markets and others. There is one problem formulation in this research, namely "What are the legal consequences if the articles of association of a limited liability company are not in accordance with or contrary to the positive law in force in Indonesia?" The research method in this study uses normative legal research methods using primary legal materials, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. From this research, it can be concluded that, if the articles of association of a PT are not in accordance with positive law in Indonesia, in this case the PT Law, then all legal actions carried out by the PT will not be considered valid, and a PT whose articles of association are not in accordance with the PT Law, can be dissolved based on a district court decision at the request of the prosecutor's office or an interested party.

Keywords: Limited Liability Companies, Articles of Association

ABSTRAK

Negara Indonesia di era modern ini perlahan-lahan mulai terlihat peningkatan dari sektor ekonominya. Salah satu penyebabnya yaitu banyaknya pengusaha yang semakin memperlebar bidang usahanya. Banyak badan usaha yang menjadi pilihan, dan Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu badan usaha yang menjadi pilihan oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan PT memiliki kelebihan-kelebihan yang cenderung "memudahkan" bagi para pelaku usaha, yang tidak dimiliki badan usaha lainnya. Beberapa kelebihan dari PT yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya yaitu: (a) tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham; (b) pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas; (c) citra yang lebih profesional apabila berbentuk PT; (d) kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu, misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain. Ada satu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana akibat hukumnya apabila anggaran dasar suatu perseroan terbatas tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?" Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, apabila anggaran dasar PT tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini UU PT, maka seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT tidak akan dianggap sah, dan PT yang anggaran dasarnya tidak sesuai dengan UU PT, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia di era modern ini perlahan-lahan mulai terlihat peningkatan dari sektor ekonominya. Salah satu penyebabnya yaitu banyaknya pengusaha yang semakin memperlebar bidang usahanya. Banyak badan usaha yang menjadi pilihan, dan Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu badan usaha yang menjadi pilihan oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan

PT memiliki kelebihan-kelebihan yang cenderung “memudahkan” bagi para pelaku usaha, yang tidak dimiliki badan usaha lainnya. Beberapa kelebihan dari PT yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya yaitu: (a) tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham; (b) pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas; (c) citra yang lebih profesional apabila berbentuk PT; dan (d) kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu, misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain (Liuw, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan Pasal 1 UU PT, PT didirikan berdasarkan perjanjian, yang artinya, pada saat pendiriannya pun, PT sudah menjadi suatu hukum. Oleh karena itu, segala aspek yang ada di dalamnya pun sudah ada aturan-aturannya tersendiri.

Tujuan PT didirikan antara lain untuk menghasilkan keuntungan dari tindakan-tindakan di dalam perusahaan yang digerakkan oleh direksi. Persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang ada, menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau berkembang (Wulandewi & Mudana, 2019). Adapun manfaat atau keuntungan dari mendirikan PT yaitu: (a) modal terdiri atas saham; (b) nama PT dilindungi negara; (c) pertanggungjawaban terbatas; (d) lebih kredibel; (e) proses mendirikan PT relatif mudah; (f) pemisahan peran masing-masing organ perusahaan; (g) leluasa memilih bidang bisnis; dan (h) pengenaan tarif pajak penghasilan.

Salah satu dari beberapa syarat untuk mendirikan PT yaitu adanya akta pendirian. Di dalam anggaran dasar, salah satu unturnya yang wajib dituangkan adalah anggaran dasar. Menurut Pasal 15 UU PT, anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik Perseroan Terbatas itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa PT merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, oleh karena itu, segala aspek yang ada di dalamnya pun sudah ada aturan-aturannya tersendiri. Salah satunya yaitu Anggaran Dasar. Tujuan dari dibuatnya Anggaran Dasar pada PT ialah sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dengan Persero, tentunya hal ini tidak kontradiksi istilah sesuai dengan standar kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 15 UU PT menyebutkan, anggaran dasar Perseroan harus sekurang-kurangnya memuat: (a) nama dan tempat kedudukan Perseroan; (b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (c) jangka waktu berdirinya Perseroan; (d) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (e) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; (f) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (g) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; (h) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan (i) tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Pasal 15 UU PT menyebutkan pula hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam suatu anggaran dasar, yaitu: ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Akan menjadi pertanyaan orang banyak, seperti yang akan konsideran tuangkan dalam Rumusan Masalah di bawah, “Bagaimana akibat hukumnya apabila anggaran dasar suatu perseroan terbatas tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?” Pertanyaan itulah yang membuat konsideran tertarik untuk membuat tulisan ini.

Rumusan Masalah adalah sebagai berikut: bagaimana akibat hukumnya apabila anggaran dasar suatu perseroan terbatas tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

2. METODE DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk menyampaikan kepada khalayak luas, baik yang ingin berkecimpung di dunia Perseoran Terbatas, maupun tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjadi UU PT yang saat ini berlaku, Undang-Undang yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas sempat mengalami beberapa kali perubahan dari waktu ke waktu, yaitu:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Werboek van Koophandel- Staatsblad 1847-23), buku kesatu titel ketiga bagian ke tiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas Terdiri dari 26 Pasal. Pasal 36 s.d. Pasal 65, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) buku ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab kedelapan tentang persekutuan.
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut (Sulaiman, 2014).

Apabila PT didirikan sebelum berlakunya UU PT, sehingga Anggaran Dasar pada PT tersebut tidak sesuai dengan UU PT, Pasal 157 UU PT mengatakan sebagai berikut:

- (a) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (b) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- (c) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (d) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan

Dalam aturan sebelumnya, UUPT No. 1 Tahun 1995, tidak ada sanksi yang dikenakan jika PT tidak mengubah Anggaran Dasarnya. Mungkin itu sebabnya pemerintah mengancam perusahaan yang tidak memperbarui anggaran dasarnya untuk mematuhi peraturan (Nur, 2019). Dengan berlakunya UU PT yang disahkan Pada tanggal 16 Agustus 2007, ketentuan baru yang belum tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 akan muncul secara otomatis.

Karena ada perubahan-perubahan dari UU No. 1 Tahun 1995 menjadi UU PT (UU No. 40 Tahun 2007), maka muncullah problematika baru bagi PT yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU PT yang pada akhirnya memunculkan akibat-akibat hukum bagi PT yang anggaran dasarnya tidak sesuai dengan UU PT, yaitu:

- (a) Jika PT tidak sesuai anggaran dasarnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan PT dianggap tidak sah karena mengandung cacat formil yakni tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dibubarkan.
- (b) Jika Perseroan dalam kurun 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU PT belum juga menyesuaikan anggaran dasarnya, maka PT yang bersangkutan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 157 UU PT).
- (c) PT yang mengajukan kredit di Perbankan akan ditolak atau ditunda jika PT tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU PT.
- (d) Jika PT tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU PT, tidak terdaftar dalam daftar perusahaan pada Departemen Hukum dan HAM RI. Akibatnya sewaktu-waktu nama PT tersebut dapat digunakan oleh pihak PT lain yang telah menaati hukum sesuai UU PT dan terdaftar dalam Departemen Hukum dan HAM RI.
- (e) PT tidak dapat beroperasi dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal merubah anggaran dasar PT, yang berwenang mengubahnya ialah RUPS. Pasal 19 ayat 1 UU PT menyebutkan, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Tentu, harus melewati prosedur dan syarat-syarat yang ada. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 21 ayat 1 UU PT). Pasal 21 ayat 2 UU PT menjelaskan, Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; (b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (c) jangka waktu berdirinya Perseroan; (d) besarnya modal dasar; (e) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau (f) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, apabila anggaran dasar PT tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini UU PT, maka seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT tidak akan dianggap sah, dan PT yang anggaran dasarnya tidak sesuai dengan UU PT, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan-penjelasan di atas, setiap PT hendaknya menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam undang-undang yang berlaku, dalam hal ini yaitu UU PT. Karena akan sangat disayangkan apabila suatu PT mendapatkan sanksi atau dibubarkan hanya karena pihak-pihak PT tidak mengetahui peraturan yang ada, atau bahkan memang dengan sengaja karena berbagai faktor sehingga lebih memilih untuk tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan apa yang tertera pada UU PT.

Hal ini untuk menjadikan PT tersebut *legal*, kepastian hukum dari status PT tersebut pun akan jelas. Di sisi lain, seluruh pihak yang berkecimpung di dalam PT tersebut pun akan mendapat kepastian hukum yang jelas pula.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi terhadap penulisan artikel.

REFERENSI

- Liuw, C. (2016) Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan. *Lex Et Societatis IV (no. 5)*: 125.
- Nur Andayani, (2019), "*Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Universitas Brawijaya, Januari
- Sulaiman, A. (2014) Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Atau Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar. *Dimensi*, Vol. 3 (No. 3): 654
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Wulandewi, I. Mudana, I. (2019) "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Volume:7, no. 40: Hlm. 1-20.